

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK Jawa Tengah

26 Daerah di Jawa Tengah Raih Predikat WTP dari BPK

<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/185197/26-daerah-di-jawa-tengah-raih-predikat-wtp-dari-bpk>

SEMARANG, suaramerdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 26 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2018. Penyerahan LHP dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Selasa (28/5) lalu.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 dari 26 kabupaten/kota tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada ketua DPRD dan kepala daerah dari masing-masing Pemda. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 26 LKPD kabupaten/kota.

Adapun rincian nama Pemda yang memperoleh opini WTP tersebut adalah sebagai berikut, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Grobogan, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Purbalingga, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Banyumas, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Pemalang.

Kalan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali mengucapkan selamat kepada 26 pemda yang sudah memperoleh opini WTP. Ayub Amali menegaskan, opini WTP yang diperoleh pemda bukan merupakan hadiah dari BPK, tapi memang merupakan buah kerja keras masing-masing pemda.

"Kerja audit mirip dengan kerja memotret. Bila yang dipotret baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau objek yang dipotret buruk, hasilnya juga pasti akan buruk. Jadi tanpa upaya semua jajaran Pemda, opini WTP tidak akan tercapai," katanya.

Lebih lanjut Kalan BPK Provinsi Jateng Ayub menjelaskan, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada empat kriteria, yaitu pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan keempat, efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. Buku pertama, memuat LKPD dan opini BPK atas LKPD, Buku kedua, memuat temuan-temuan terkait SPI, dan buku ketiga, memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat Pemda wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Meski 26 Pemda tersebut sudah memperoleh opini WTP, menurut Kalan BPK Provinsi Jateng, masih ada beberapa catatan baik terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Terkait SPI, permasalahan-permasalahan yang ditemukan antara lain adalah, penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum dilaksanakan dengan tertib, antara lain tanah belum bersertifikat dan belum tercatat di KIB, pemanfaatan aset tanah belum didukung dokumen, aset Peralatan dan Mesin tidak ditemukan, kendaraan belum dilengkapi BPKB, dan Perumahan belum menyerahkan PSU Kepada Pemda.

Pada akhir sambutannya, Kalan BPK Provinsi Jateng menyinggung rencana BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja di beberapa pemda di Jateng. "Pemeriksaan kinerja oleh BPK rencananya akan dilakukan di semester dua tahun 2019," katanya.

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH